KATA PENGATAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta penggunaan anggaran, juga sebagai media informasi kepada publik atas capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang memberikan informasi kinerja secara akurat dan obyektif pada stakeholder untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, demikian laporan kinerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Benteng, Januari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19640310 198611 1 002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, mewajibkan kepada instansi pemerintah untuk melaporkan kinerjanya berdasarkan azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, sebagai bentuk pertanggung jawaban Institusi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan atau APBN.

Dalam laporan kinerja ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dengan maksud mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun angggaran, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan yang dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pada Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :

1) Kepala Badan;
2) Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Program;
   b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
   c. Subbagian Keuangan.

3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7) Kelompok Jabatan Fungsional
   a. Perencana Ahli; dan
   b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar

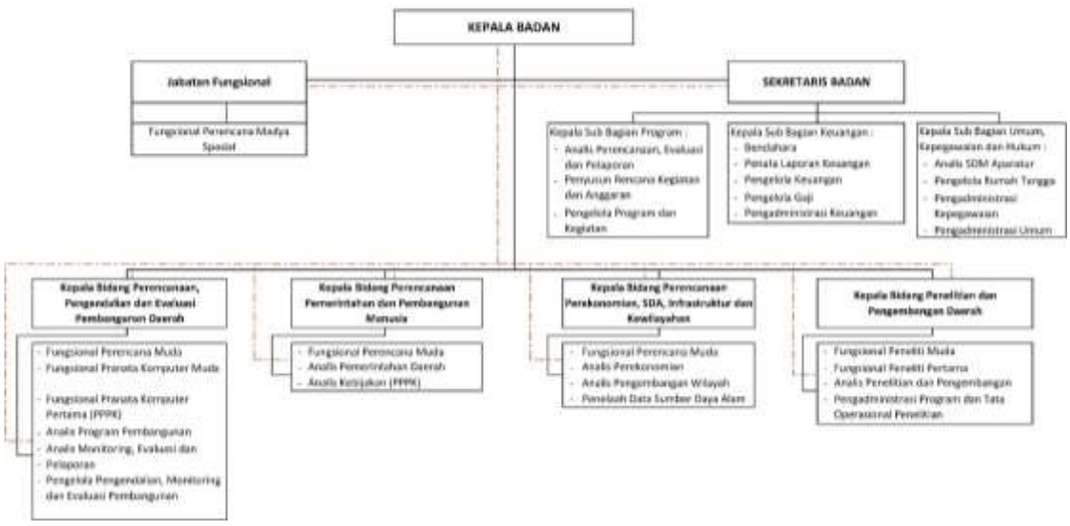

1.3.3. Cascading Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Adapun cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Pohon Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2021-2026

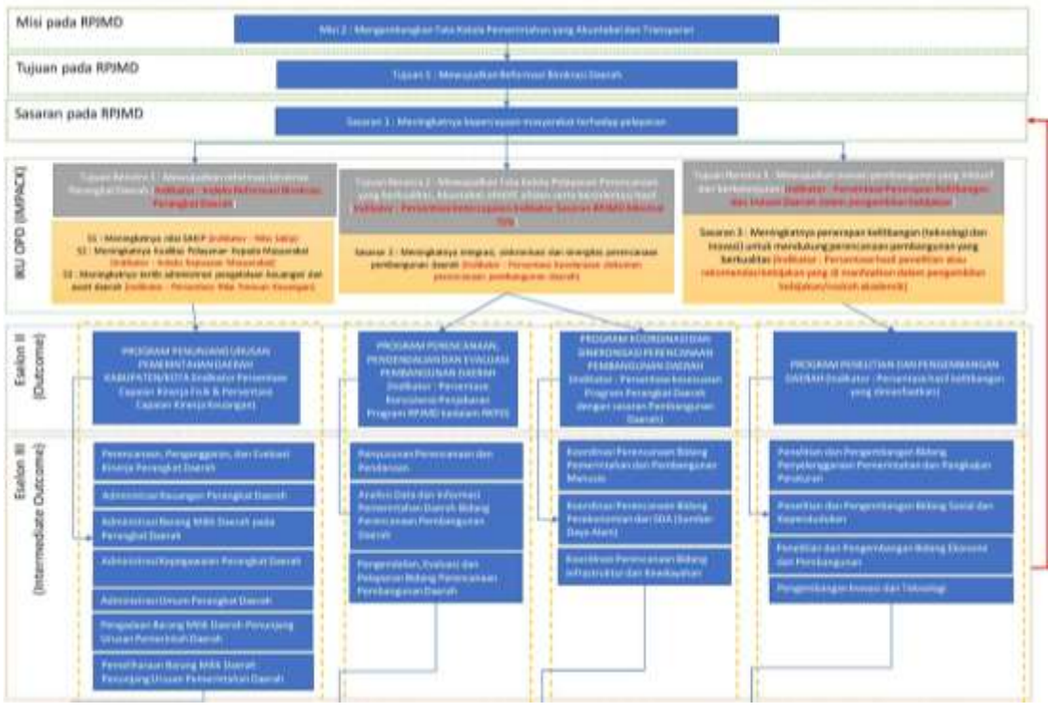

1.3.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran

Berdasarkan data kepegawaian per Desember 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 Orang. Selain itu, terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 33 pegawai. Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN berdasarkan jenjang pendidikan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel. I.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	**26**	**86,67%**	**41,27%**	**23**	**69,70%**	**36,51%**
1	S3	1	3,33%	1,59%			
2	S2	10	33,33%	15,87%			
3	S1	14	46,67%	22,22%	23	69,70%	36,51%
4	D3	1	3,33%	1,59%			
	Bukan Perguruan Tinggi	**4**	**13,33%**	**6,35%**	**10**	**30,30%**	**15,87%**
1	SMA	4	13,33%	6,35%	10	30,30%	15,87%
Jumlah		30			33		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		**63**					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

Berdasarkan dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 Orang (23%), golongan III sebanyak 20 Orang (67%), dan golongan II sebanyak 3 Orang (10%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. I.2.
Jumlah ASN Berdasarkan
Golongan / Ruang Tahun 2023

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	7	23%
	IV/c	1	3%
	IV/a	6	20%
2.	Golongan III	20	67%
	III / d	10	33%
	III / c	1	3%
	III / b	6	20%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	3	10%
	II / d	1	3%
	II / c II / b	1 1	3% 3%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 30 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.33%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,67%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (36.67%) termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 10 pegawai (33.33%) yang termasuk dalam jabatan pelaksna, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. I.3.
Jumlah, Pegawai ASN
yang Menduduki Jabatan Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3.33%
2	Eselon III	5	16.67%
3	Eselon IV	3	10%
4	Jabatan Fungsonal Tertentu	11	36.67%
5	Jabatan Pelaksana	10	33.33%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dapat berjalan dengan baik, perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 1.4.
Jumlah Aset Bappelitbangda Kep. Selayar
per Desember 2023

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1		*2*	*3*
03	ASET TETAP		
01	Tanah		-
01	Tanah		
02	Peralatan Dan Mesin	344	3.164.122.955,00
01	Alat Besar		
02	Alat Angkutan	36	1.123.639.100,00
03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	16.651.550,00
04	Alat Pertanian		-
05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	173	836.155.995,00
06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	13	170.523.200,00
07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		-
08	Alat Laboratorium	5	3.680.000,00
09	Alat Persenjataan		
10	Komputer	114	989.473.110,00
11	Alat Eksplorasi		
12	Alat Pengeboran		
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		20.000.000,00
14	Alat Bantu Eksplorasi		
15	Alat Keselamatan Kerja	1	4.000.000,00
16	Alat Peraga		
17	Peralatan Proses/Produksi		
18	Rambu - Rambu		
19	Peralatan Olah Raga		
03	Gedung Dan Bangunan	4	2.728.745.053,00
01	Bangunan Gedung	4	2.728.745.053,00
02	Monumen		
03	Bangunan Menara		
04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
04	Jalan, Jaringan Dan Irigasi		-
01	Jalan Dan Jembatan		
02	Bangunan Air		
03	Instalasi		
04	Jaringan		
05	Aset Tetap Lainnya	1	144.405.800,00
01	Bahan Perpustakaan	1	144.405.800,00
02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
03	Hewan		
04	Biota Perairan		

KODE ASET			Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			1	*2*	*3*
		05	Tanaman		
		06	Barang Koleksi Non Budaya		
		07	Aset Tetap Dalam Renovasi		
	06		Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
		01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
05	Aset Lainnya			105	165.643.687,00
	02		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-
		01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
	03		Aset Tidak Berwujud		56.800.000,00
		01	Aset Tidak Berwujud	2	56.800.000,00
	04		Aset Lain-Lain		618.808.750,00
		01	Aset Lain-Lain	103	618.808.750,00
	05		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.747.666,67)
		01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.747.666,67)
	06		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(461.217.395,84)
		01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(461.217.395,84)

Sumber : Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar 2023

Tabel. 1.5.
Perbandingan Dukungan Anggaran
Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Tahun	Jumlah
2021	Rp. 7.112.120.900
2022	Rp. 5.133.941.600
2023	Rp. 6.322.618.083

Sumber : Bappelitbangda 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp. 6.322.618.083, naik 23,15% dari tahun sebelumnya.

1.4. ISU – ISU STRATEGIS

Dalam penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, salah satu substansi dalam perencanaan adalah dengan perumusan masalah atau identifikasi masalah dilakukan terlebih dahulu yang kemudian ditindak lanjuti dengan perumusan isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan

Selayar, maka diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Rumusan Masalah dan Isu Strategis

Rumusan masalah	Isu Strategis
1) Perubahan yang dinamis dari peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, khususnya nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya; 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat; 3) Sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan program Pembangunan prioritas dan non prioritas Perangkat Daerah kurang optimal	1) Pengoptimalan penyediaan data/informasi yang berkualitas dan pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan melalui sistem informasi terintegrasi; 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 3) Peningkatan fungsi kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

1.5. TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP TAHUN 2022

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
1) Perencaan Kinerja		
a	Rencana Kinerja tahunan/rencana kerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Rekomendasi : Memanfaatkan rencana kerja tahunan/rencana kerja dalam penyusunan anggaran	Rencana Kerja tahunan telah di manfaatkan dalam penyusunan anggaran, beberapa kegiatan strategis seperti : 1) penyusunan Ranwal RPJPD 2025-2045; 2) Penyusunan hingga penetapan RKPD 2024; 3) Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2023 4) Amanat RPJMD pada indikator sasaran 1 “indeks kepuasan masyarajat dan pengukuran indikator tujuan 6 “indeks kesalehan sosial; mendapat porsi anggaran prioritas.

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
2) Pengukuran Kinerja		
a	Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum di lakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)	Data kinerja telah di kumpulkan per triwulan mulai dari pejabat eselon II hingga pejabat pelaksana
	Rekomendasi : melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (Bulanan/Triwulan/semester)	
b	Pengukuran kinerja belum di kembangkan menggunakan teknologi informasi	Pengembangan teknologi informasi berbasis website dalam pengumpulan data kinerja
	Rekomendasi : mengembangkan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.	
c	Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment.	SOP reward & punishment telah disusun
	Rekomendasi : Menyusun SOP pemberian reward & punishment yang mendasari hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas.	
3) Evaluasi Internal		
a	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan	Akan meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan ditindak lanjuti dalam bentuk Langkah nyata
	Rekomendasi : menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan	
b	Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	
	Rekomendasi : Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	
c	Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk Langkah-langkah nyata	
	Rekomendasi : Menindaklanjuti evaluasi rencana aksi dalam bentuk Langkah-langkah nyata.	

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026

2.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar

Perumusan rencana strategis dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud, Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (pilkada), kemudian disusunlah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk pernyataan–pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, Adapun tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026
Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1. Meningkatnya efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan system kelembagaan dan pengawasan, dan meningkatnya inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Perdesaan		
2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan.	2. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan dan kualifikasi desa.
	3. Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan.	3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya local dalam rangka mengembangkan lapangan kerja dan lapangan usaha di perdesaan.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
3. Meningkatkan Fasilitas pembangunan sumber daya Manusia	4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat	4. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan
	5. Meningkatnya daya beli masyarakat	5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
4. Mengoptimalkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia	6. Meningkatnya usaha perikanan	6. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan, penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	7. Meningkatnya Usaha Pariwisata	7. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan, daya Tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi, dan sumberdaya manusia pariwisata
	8. Meningkatnya usaha industry, transportasi dan perdagangan	8. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pengembangan industry, peningkatan akses tranportasi dan infrastruktur Pelabuhan, dan akselerasi perdagangan dalam dan luar wilayah melalui Kerjasama antar daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5 : Meningkatnya Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan		
5. Meningkatnya aktualisasi nilai budaya	9. Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan local dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	9. Meningkatkan peran Lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan daerah
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	10. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	
Misi 6 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
7. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	11. Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencamaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauann Selayar Tahun 2021 – 2026.

Melihat dari tabel 2.1 diatas, Bappelitbangda mendukung pada pencapaian misi 1, tujuan 1, sasaran 1, Adapun sasarannya yaitu : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda 2021-2026

Berdasarkan Visi Misi yang telah dirumuskan serta mempertimbangkan nilai – nilai dan faktor – faktor kunci keberhasilan maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tercantum dalam Rencana Srategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2021 – 2026, Adapun tujuan dan sasaran Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Rencana Strategis Bappelitbangda			Target Kinerja Tahun Ke-				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Sakip Bappelitbangda	Nilai Sakip	B	B	BB	BB	A
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase nilai temuan keuangan	0%	0%	0%	0%	0%
Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	85%	90%	95%	95%
Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kep. Selayar 2021-2026

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun, maka disusunlah strategi dan kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar kurun waktu 2021-2026, adapun strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (T1)	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Meingkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik; 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	1. Meningkatkan Kapabilitas kelembagaan Perencana, koordinasi dan kompetensi SDM Perencana; 2. Menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan;
Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil (T2)	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	3. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah melalui sistem informasi terintegrasi; 4. Pengoptimalan Koordinasi Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;	3. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan; 4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Lingkup (a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan (c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (T3)	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	5. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.	5. Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta, Infrastruktur dan Kewilayahan".

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kep. Selayar 2021-2026

2.2. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penetapan kinerja antara atasan dan bawahan, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran, disusun dan ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya dan tugas pokok serta fungsi yang dimiliki oleh individu atau organisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 18/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026, di uraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	(Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah program dalam RPJMD) X 100%	Bappelitbangda Kep Selayar
		Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	(Jumlah program prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah program prioritas pembangunan daerah) X 100%	Bappelitbangda Kep Selayar
2	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam	(Jumlah hasil penelitian atau kajian yang menjadi bahan atau referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibagi dengan penelitian	Bappelitbangda Kep Selayar

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	perencanaan pembangunan yang berkualitas	pengambilan kebijakan/naskah akademik	atau kajian yang dihasilkan) x 100%	

Sumber : Dokumen IKU Bappelitbangda Kep. Selayar

2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2023, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan 4 Program, 18 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Croscutting Sasaran Program dan Anggaran
DPA Perubahan tahun 2023

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase Anggaran	Ket
1	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.044083.000	16.51%	Bappelit bangda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 665.226.000	10,52%	Bappelit bangda
2	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 521.195.000	8.24%	Bappelit bangda
3	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /	Rp. 797.181.800	12.61%	Bappelit bangda
4	Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah		Rp. 3.294.932.289	52.11%	Bappelit bangda

Sumber : DPA Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2023

Tabel 2.6
Rencana Kerja Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2023

No			URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023
1			2	3	4	5
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja**	**63.03%**	**Rp. 4.092.114.083,00**
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	**83,00%**	
	1		**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah**	**Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**100%**	**Rp. 15.029.000,00**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda	1 Dokumen	**Rp.** 3.283.300,00
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	**Rp.** 1.500.000,00
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	**Rp.** 1.500.000,00
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	**Rp.** 1.700.000,00
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	**Rp.** 2.000.000,00
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	**Rp.** 3.045.709,00
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	**Rp.** 2.000.000,00
	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu**	**100%**	**Rp. 2.918.850.283,00**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	**Rp.** 2.898.850.283,00
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	**Rp.** 12.000.000,00
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	**Rp.** 5.000.000,00
		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Peeriksaan	1 Dokumen	**Rp.** 3.000.000,00
	3		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu**	**100%**	**Rp. 6.000.000,00**
		1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	**Rp.** 3.000.000,00
		2	Penatausahaan Barang Milik Derah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	**Rp.** 3.000.000,00

No			URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023	
	4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya**	**100%**	**Rp.**	**30.000.000,00**
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 ASN	**Rp.**	30.000.000,00
	5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan**	**100%**	**Rp.**	**515.386.000,00**
		1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	500 Buah	**Rp.**	24.846.000,00
		2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bhaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Koran	**Rp.**	5.920.000,00
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	**Rp.**	430.620.000,00
		4	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	**Rp.**	54.000.000,00
	6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**Rp.**	**125.889.000**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	**Rp.**	76.000.000,00
		1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	**Rp.**	6.500.000,00
		2	Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	**Rp.**	7.523.000,00
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 Unit	**Rp.**	35.876.000,00
	7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**Rp.**	**236.766.800,00**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	**Rp.**	30.230.000,00
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	**Rp.**	206.536.000,00
	8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100%**	**Rp.**	**244.183.000,00**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	**Rp.**	152.780.000,00
		2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Unit	**Rp.**	2.800.000,00
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	**Rp.**	10.750.000,00
		4	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100m2	**Rp.**	65.043.000,00

No			URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023	
		5	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	14 Unit	**Rp.**	12.810.000,00
2			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)**	**85%**	**Rp.**	**1.044.083.000,00**
	1		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan**	**85%**	**Rp.**	**736.588.000,00**
		1	Analisis Kondisi Daerah,Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Teknokratik)	2 Dokumen	**Rp.**	20.891.000,00
		2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Telaahan	**Rp.**	108.259.000,00
		3	Pelaksaaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	**Rp.**	42.604.000,00
		4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1 Berita Acara	**Rp.**	36.955.000,00
		5	Penyipan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan Kecamatan	**Rp.**	54.090.000,00
		6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang di Tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	**Rp.**	473.789.000,00
	2		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan**	**100%**	**Rp.**	**51.287.000,00**
		1	Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Masukan	**Rp.**	11.450.000,00
		2	Pembinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	32 Orang	**Rp.**	18.791.000,00
		3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	**Rp.**	21.046.000,00
	3		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan**	**100%**	**Rp.**	**256.208.000,00**
		1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	**Rp.**	21.530.000,00
		3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembanguan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	**Rp.**	234.678.000,00
3			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)**	**80%**	**Rp.**	**665.226.000,00**
	1		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**80%**	**Rp.**	**263.244.000,00**

No			URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023	
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	11 Dokumen	**Rp.**	14.358.000,00
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	**Rp.**	4.675.000,00
		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	**Rp.**	17.782.000,00
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	**Rp.**	74.612.000,00
		5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5 Dokumen	**Rp.**	29.216.000,00
		6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 Dokumen	**Rp.**	10.000.000,00
		7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	**Rp.**	56.890.000,00
		8	koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	**Rp.**	55.711.000,00
	2		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**85%**	**Rp.**	**163.065.000,00**
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	**Rp.**	21.876.000,00
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Dokumen	**Rp.**	4.410.000,00
		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Rekomendasi	**Rp.**	20.860.000,00
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembagunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Dokumen	**Rp.**	24.728.000,00
		5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD,dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	**Rp.**	29.887.000,00

No			URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023	
		6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Dokumen	**Rp.**	**7**.950.000,00
		7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Rekomendasi	**Rp.**	16.795.000,00
		8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembagunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Dokumen	**Rp.**	36.559.000,00
	3		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**80%**	**Rp.**	**238.917.000,00**
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	**Rp.**	35.418.000,00
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Dokumen	**Rp.**	5.590.000,00
		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Rekomendasi	**Rp.**	62.364.000,00
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Dokumen	**Rp.**	53.280.000,00
		5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12 Dokumen	**Rp.**	35.189.000,00
		6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 Dokumen	**Rp.**	6.180.000,00
		7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Rekomendasi	**Rp.**	14.618.000,00
		8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Dokumen	**Rp.**	26.278.000,00
4			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBNGAN DAERAH**	**Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah**	**100%**	**Rp.**	**521.195.000,00**
	1		**Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan**	**100%**	**Rp.**	**321.172.000,00**
		1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Dokumen	**Rp.**	85.212.000,00

No			URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023	
		2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	**Rp.**	235.960.000,00
	2		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan**	**100%**	**Rp.**	**149.899.000,00**
		1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Aspek Aspek Sosial	2 Dokumen	**Rp.**	149.421.000,00
	3		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan**	**100%**	**Rp.**	**-**
		1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	**Rp.**	-
		2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	**Rp.**	-
	4		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi**	**50%**	**Rp.**	**50.124.000,00**
		1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil penelitian, pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	**Rp.**	**-**
		2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	3 Jenis	**Rp.**	50.124.000,00
			T O T A L			**Rp.**	6.322.618.083,00

Sumber : DPA Perubahan Bappelitbangda Tahun Anggaran 2023

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kep Selayar Tahun Anggaran 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang berkualitas, Akuntabel, efektif efisien serta berorientasi hasil	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	85%
			Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	85%
2	Mewujudkan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik	100%
3	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai Sakip	B
		Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase nilai temuan keuangan	0%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bappelitbangda Kep Selayar

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban pihak-pihak tertentu untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan memastikan organisasi atau individu dapat mencapai tujuan lebih efektif, efisien dengan mempertahankan transparansi kinerja.

Bappelitbangda Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Kepulauan Selayar tahun 2023. Dengan perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Rencana}} \text{ X } 100\%$$

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Sebagai implementasi dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepulaaun Selayar Nomor : 18/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	85	100	117,65
		Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	%	85	100	117,65
2.	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik	%	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2023

Adapun sasaran, indikator dan capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian Kinerja**	**Kode**
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	85	100	117,65	
		Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	%	80	100	117,65	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kode
2.	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik	%	100	100	100	
3.	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai Sakip	Nilai	B (60)	B* (60,84)	101,40	
	Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase nilai temuan keuangan	%	0	0**	100	

Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2023
* Capaian Tahun 2022
**Capaian Tahun 2021

Bappelitbangda memiliki 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Kepulauan Selayar. Pada tahun 2023, persentase capaian sebesar 107.34% dengan 2 Indikator hasil pengukuran tahun sebelumnya.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 :

3.2.1. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 1

Disebutkan diatas bahwasanya sasaran strategis ke-1 mempunyai 2 (dua) indikator kinerja. Sasaran ke-1 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, sasaran ke-1, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	:	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
Indikator	:	1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD; 2. Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-1

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2022)	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	85	100	117,65	95	105.26
2.	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	100	85	100	117,65	95	105.26

Sumber Bappelitbangda Kep Selayar 2023

- **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-1**
  - Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu ***Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100%***, Indikator ini menunjukkan seberapa baik program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program RPJMD yang tercantum dalam RKPD dan jumlah program RPJMD yang seharusnya ada dalam RKPD. Persentase konsistensi penjabaran program dalam RKPD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerjemahkan RPJMD dengan baik dan konsisten.

    Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) program perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 terdapat 285 (dua ratus delapan puluh lima) program. pernyataan tersebut dapat dilihat pada Laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 oleh Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan dan pada Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 halaman 33;

Dari 274 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2023, terdapat 245 program yang dianggarkan pada APBD dan sebanyak 29 program atau sebanyak 10,58 persen yang tidak dianggarkan pada APBD;

Dari 733 kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2023, terdapat 589 kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 144 kegiatan atau sebanyak 19,65 persen tidak dianggarkan pada APBD;

Dari 2911 sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2023, terdapat 1604 sub kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 1307 sub kegiatan atau sebanyak 44,90 persen yang tidak dianggarkan pada APBD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

1. Penyusunan Rancangan Awal (Tekhnokratik) Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024);
2. Pelaksanaan Konsultansi Publik Dokumen RKPD Tahun 2024;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Pelakanaan Musrembang RKPD Tahun 2024;

4. Verifikasi Usulan kegiatan hasil musrembang kecamatan Tahun 2024;
5. Rapat Komisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD Tahun 2024) pada Bappelitbangda Propinsi Sulawesi-Selatan;
7. Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023);
8. Pendampingan penginputan SIPD Perencanaan pada Perangkat Daerah;
9. Penyusunan Buku Profil Pembangunan Tahun 2023;
10. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 di Provinsi;
11. Pelaksanaan e-planning (proses perencanaan dan penganggaran dan pelaporan) memalui aplikasi terpusat yang disediakan kemendagri yakni SIPD; dan,
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala pengendalian pembangunan berbasis web (e-manca).

Selain upaya pencapaian kinerja tersebut diatas, tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan penyusunan Rancangan Awal (Tekhnokratik) RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045, yang tahap penyusunannya telah sampai pada Pelaksanaan Konsultansi Publik Dokumen Rancangan Awal RPJPD 2025-2045.

- **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-2**
  - Tabel 3.4 Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-2 dengan indikator kinerja sasaran yaitu ***Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah sebesar 100%***, indikator ini mengukur sejauh mana program prioritas yang diterapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan jumlah total program prioritas perangkat daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, maka semakin baik program prioritas perangkat daerah mewujudkan sasaran prioritas pembangunan daerah. Ini penting untuk memastikan

bahwa program pembangunan daerah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator ini juga membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja program prioritas perangkat daerah dan memastikan bahwa program pembangunan daerah selaras dengan sasaran prioritas pembangunan daerah.

Perumusan program prioritas tahun 2023 mengacu pada tema fokus dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2023, dimana kebijakan nasional pada RKP 2023 diarahkan untuk mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, penjelasan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD perubahan tahun 2023 halaman 108 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi sistem pelayanan publik	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhdap pelayanan	1, Indeks kepuasan masyarakat; 2. Nilai sakip daerah; 3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Diskominfo SP
				Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Setda
					Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	
				Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
					Persentase ASN yang berkinerja baik	
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Semua Kecamatan
				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Bappelitbangda
				Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Daerah
				Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	BPKPD
				Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Disdukcapil
					Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	
				Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
					Persentase Warga Negara yangmemperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	DP3AP2KB
				Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Diskominfo SP
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Bappelitbangda
				Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Setwan
	Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan merata serta sesuai sistem penataan dan pemanfaatan ruang	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	DisPUTR
					Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	
					Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	
				Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	DisPMD
				Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembagan kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	DisPMD
				Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	DisPMD
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian	Distan KP
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Semua Kecamatan
				Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	DPK

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Program pengelolaan persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	DLH
				Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
				Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	Disdikpora
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Dinkes
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya unggulan	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	1. Tingkat Kemiskinan; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	DPMPTSPTK
				Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	DPMPTSPTK
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Disperindag KUKM
				Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Distan KP
				Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	DPKP
				Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)	DP3AP2KB
					BKB	
					BKR	
					BKL	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
					PIK R	
					UPPKS	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1. Indeks Pendidikan; 2. Indeks Kesehatan	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Disdikpora
					Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	
					Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi	Dinsos
				Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos
					Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	
					Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	
					Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	
				Program penanganan bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)	Persentase luas kawasanpemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	DisPUTR
					Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	
					pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	
					Persentase Luas Daerah irigasi kewenagan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	DisPUTR
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	DisPUTR
				Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DPKP
					Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	DPKP
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
					Waktu Tanggap (Response Time)Penangnan Kebakaran	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Distan KP
				Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	DP3AP2KB
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Dinkes
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinkes
					Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Persentase Warga Negara dengangangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	
					Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
					Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	
					Nilai Akreditasi Rumah Sakit	
		Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau	Disperindag KUKM
				Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Disperindag KUKM
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya unggulan	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	DPMPTSPTK
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Disper
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Disper
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Setda
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produk Olahan Hasil Perikanan	Disper
				Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase ketaatan usaha perikanan budidaya dalam kabupaten terhadap peraturan perundang-undangan	Disper
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	Disperindag KUKM
		Meningkatnya usahapariwisata	Persentase Kontribusi PADSektor	Program peningkatan daya tarikdestinasi pariwisata	Kontribusi sector pariwisataterhadap PAD	Disparbud
				Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Disparbud

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Pariwisataterhadap PAD Kabupaten		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten KepulauanSelayar	
					Tingkat huniaan akomodasi	
				Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pandaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Dishub
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Disparbud
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Disperindag KUKM
				Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Disperindag KUKM
				Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Disperindag KUKM
		Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	DPMPTSPTK
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	DPMPTSPTK
				Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Dishub
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	Dishub
	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	Program pengembangan kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Disparbud
				Program penyelenggaraanurusan pemerintahan umum	Persentase Konflik Sosial danKeagamaan di tingkat kecamatan	SemuaKecamatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Semua Kecamatan
				Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Kesbangpol
	Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1. Indeks Kualitas Air; 2. Indeks Kualitas Udara; 3. ndeks Kualitas Tutupan Lahan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	DLH
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLH
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	DLH
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	DisPUTR

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauann Selayar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Tabel 3.5 diatas menunjukkan keselarasan terkait indikator kinerja 72 (tujuh puluh dua) program prioritas perangkat daerah dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran prioritas pembangunan daerah, sedangkan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	1. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	15 Program	
2	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2) Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	8 Program	
3	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
4	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasisi potensi desa	9 Program	
5	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4) Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	19 Program	
6	6. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing			
7	7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	7 Program	
	J U M L A H		72 Program	

Pernyataan pada tabel 3.5 dan tabel 3.6 diatas dapat dilihat pada laporan hasil evaluasi Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 oleh Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan, juga pada Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 halaman 109.

Harmonisasi dan Sinkronisasi pencapaian tersebut di atas dicapai melalui fasilitasi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing bidang perencanaan Pembangunan diantaranya :

a) Bidang Pemerintahan yakni : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem, koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE serta pemantuan capaian pelaksanaan SDGs;
b) Bidang Pembangunan manusia diantaranya fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting (rembuk stunting, manajemen data stunting, reviu program kegiatan penurunan angka stunting), pengembangan regulasi anak putus sekolah (pengembangan rencana aksi daerah dan memastikan anggaran berbasis sektor), kesetaraan gender, Kabupaten Layak Anak (KLA), serta teviu terhadap capaian indikator kabupaten sehat;
c) Bidang perekonomian diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau propinsi Sulawesi Selatan;
d) Bidang Sumber Daya Alam diantaranya fasilitasi pendampingan Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat), RPSDA-WS (rencana pembangunan strategis sumber daya air wilayah Jeneberang) dan Penyusunan KLHS RPJPD Selayar 2025-2045;
e) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan RDTR (Kawasan KIPT Hangkoang dan KEK Pasi Gusung) dan pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir sasaran strategis terkait capaian indikator ke-1, dan ke-2 maka dapat dilihat bahwasanya tahun kedua renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 105,26%.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran sebelumnya, bahwa indikator Sasaran Strategis Pertama ini didukung oleh **Program Perencanaan,**

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** yang terdapat di tiga Bidang yakni Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Tabel 3.7
Corscutting Sasaran Program Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah (S3	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	c. Pengendakian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Porgram Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguan Daerah
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realiasasi	Capaian
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Rp. 1.709.309.000	Rp. 1.647.161.426	96.36%

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	117,65	96.36	21.29	103,23	Sangat Efisien

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.1.647.161.426,00 atau 96.36% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 117,65%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 103.23%.

- Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :

a. Pendukung :
   - Terjalinnya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan penelitian dan pemgembangan dalam pengambilan kebijakan;
   - Konsistensi dalam implementasi program kegiatan;
   - Sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelibangda.

b. Permasalahan :
   - Dinamisnya perubahan peraturan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, hal ini berdampak pada tingkat konsistensi indikator kinerja dokumen perencanaan daerah dengan indikator kinerja dokumen perencanaan OPD pelaksana;
   - Belum Optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengumpulan dan Validasi data capaian indikator kinerja daerah (SPM, LPPD, dan SDGs) dari OPD Pelaksana yang terbagi dalam Bidang Infrastruktur, Bidang SDA, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Pemerintahan Kewilayahan, hal ini berdampak pada lambatnya penyusunan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya pada Bab II yang memuat gambaran umum kondisi daerah.

c. Solusi
   - Pengoptimalan penyediaan data/informasi yang berkualitas dan pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan;
   - Peningkatan fungsi kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur,

ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 2

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-2 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ke-2 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, sasaran ke-2, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	:	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas
Indikator	:	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-2

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2022)	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
3.	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan (2)	100	100	100	100	100	100

- **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-3**
  - Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2 dengan indikator kinerja sasaran yaitu ***Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik*** **sebesar 100%,** indikator ini mengukur sejauh mana hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang diterima oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dihitung dengan membandingkan jumlah kebijakan atau naskah akademik yang benar-benar digunakan sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan dengan jumlah total hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang diterima**,** semakin tinggi persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan, maka semakin baik hasil penelitian dan

rekomendasi kebijakan mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Terdapat 2 hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan daerah / naskah akademik pada kegiatan penyusunan Rancangan Awal (Teknokratik) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, penyusunan Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 dan penyusunan Rancangan Awal (Teknokratik) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Adapun judul dari 2 kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan Ranwal tersebut yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022;
2. Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Pada Tahun 2023, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan kelitbangan, 2 (dua) diantaranya akan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada penyusunan naskah akademik Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025, diantaranya 1) Penyusunan Naskah Akademik (Ranwal) Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2031; 2) Penyusunan Naskah Akademik (Ranwal) Dokumen RKPD Kepulauan Selayar Tahun 2025), dan Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Adapun kegiatan dan fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan tahun 2023 diantaranya :

1. Survei Kepuasan Masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
2. Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Pengelolan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;

4. Fasilitasi Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
5. Fasilitasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
6. Fasilitasi Pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2023;
7. Evaluasi program bantuan nelayan;
8. Fasilitasi kajian alga bloom;
9. Koordinasi inisiasi pembentukan kebun raya di puncak tanadoang; dan
10. Fasilitasi inovasi (rumput laut jadi pupuk).

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator ke-3, maka dapat dilihat bahwasanya tahun pertama renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Kedua ini didukung oleh **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** yang terdapat di Bidang Penelitan dan Pengembangan Daerah

Tabel 3.11
Croscutting Sasaran Program dan Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan
Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	a. Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Anggaran Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realiasasi	Capaian
Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas (S2)	Rp. 521.195.000	Rp. 520.608.556	99.89%

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	99,89	0,11	50.28	Efisien

Dari kedua tabel diatas, realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.521.195.000 atau 99.89% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-2 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 50,28%.

❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :

a. Pendukung :
   - Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Stakeholder terkait dalam meningkatkan inovasi daerah guna mendukung inovasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. Permasalahan :
   - Penyediaan data base kelitbangan yang akurat dan up to date guna mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis;

c. Solusi
   - Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama guna mendorong pengembangan database penelitian dan inovasi daerah yang berbiaya murah.

3.2.3. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 3

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-3 mempunyai 2 (dua) inikator kinerja. Sasaran ke-3 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Sekretariat, dengan indikatornya adalah sebagai berikut

Sasaran	:	Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
Indikator	:	1. Nilai Sakip 2. Persentase Nilai Temuan Keuangan

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-3

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2022)	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
4.	Nilai Sakip	CC (52,36)	B (60)	B* (60,84)	101,4	A (80)	76,05
5.	Persentase Nilai Temuan Keuangan	0	0	0**	100	0	100%

Sumber Bappelitbangda Kep Selayar 2023
*Capaian kinerja Tahun 2022
**Capaian kinerja Tahun 2021

- **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-4**

  - Tabel 3.14 Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-4 dengan indikator kinerja sasaran yaitu ***Nilai Sakip sebesar 101,4%.***

    Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja **Nilai Sakip** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023, disebabkan pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2023 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun target yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2023 mendapat nilai B (60) dengan capaian kinerja 101,4%.

    Namum demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian SAKIP Bappelitbangda Nomor : 018/REV-LAKIP/II/2023/ITDA tanggal 20 Februari 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2022, bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 60,48 dengan kategori B (Baik), dengan demikian Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

- **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-5**

  - Tabel 3.14 diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-5 dengan indikator kinerja sasaran yaitu ***Persentase Nilai Temuan Keuangan sebesar 100%.***

    Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja ***Persentase Nilai Temuan Keuangan*** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023, dikarenakan pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2023 pada review Inspektorat sebesar 0% dengan capaian kinerja 100%.

    Namun demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan surat tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 700/068/PKPT/VII/2022/ITDA/ tanggal 20 Juli 2022 dan laporan pemeriksaan regular pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, bahwasanya untuk tahun 2021, Bappelitbangda Kepulauan Selayar ***telah menindaklanjuti hasil temuan*** yang tidak di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp.73.282.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

  - **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

    a. Pada sasaran ke-3 Indikator ke-1 yaitu **Nilai Sakip,** maka dapat dilihat bahwasanya realisasi tahun kedua Renstra mendapat nilai Sakip 60,48 atau Predikat B dengan Capaian 101,4%. jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 80 atau predikat A, maka Bappelitbangda akan terus berupaya dan berkomitmen dalam meningkatkan Nilai SAKIP, sehingga pada tahun terakhir Renstra target tersebut dapat diraih atau bahkan melebihi dari target tahun terakhir Renstra Bappelitbangda;

    b. Pada sasaran ke-3, Indikator 2 yaitu **Persentase Nilai Temuan Keuangan**, maka dapat dilihat bahwasanya

Realisasi tahun pertama Renstra sebesar 0% dengan capaian 100%, maka dapat dilihat bahwasanya tahun pertama renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan memonitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini diantaranya kegiatan rapat-rapat guna evaluasi program dan kegiatan.

- **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

  Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Kedua ini didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Tabel 3.15
Croscutting Sasaran Program dan Kegiatan

Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah
	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
	c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Anggaran Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realiasasi	Capaian
1. Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda 2. Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Rp.4.092.114.083	Rp.4.034.069.855	99.58%

Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efieiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
1. Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	100*				
2. Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	100**				
Rata-rata Capaian Kinerja	100	98.58	1,42	53,55	Efisien

* capaian Kinerja tahun 2022
**capaian Kinerja tahun 2021

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.4.034.069.855 atau 99.58% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-3 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 53,55%, seperti yang digambarkan pada tabel 3.17

❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :

d. Pendukung :
   - Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam lingkup kerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar;
   - Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
   - Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.

e. Permasalahan :
   - Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.

f. Solusi
   - Peran aktif pejabat struktural dalam mengawal program dan kegiatan baik dari kinerja maupun anggaran;
   - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran hal ini dilakukan agar pencapaian target kinerja dapat dicapai;
   - Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan teknis.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai, dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.6.322.618.083 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.18
Target belanja Bappelitbangda APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	target	Persentase
1	**Belanja Operasi**	**Rp. 6.196.719.083**	**98,01%**
1.1	Gaji Pokok PNS	Rp. 2.898.850.283	45,85%
1.2	Belanja Barang Jasa	Rp. 3.297.868.800	52,16%
2	**Belanja Modal**	**Rp.125.899.000**	**1,99%**
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.125.899.000	1,99%
2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00%

A. Belanja Operasi

Belanja Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.6.196.719.083,- dan terealisasi sebesar Rp.6.086.292.837,- atau 98,22%.

B. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.125.899.000,- dan terealisasi sebesar Rp.115.547.000,- atau 91,78%

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi kinerja keuangan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.19

Formulir Evaluasi Hasil Renja, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Pelaksanaan 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB Indeks	22.951.259.390	BB Indeks	2.981.883.155	BB Indeks	4.092.114.083	B*								B		B	
		Persentase nilai temuan keuangan	0		0		0				0						0		0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	72,31 %	22.951.259.390	100,00 %	2.981.883.155	70,53 %	4.092.114.083	20,55	586.245.021	50,53	1.271.738.875	78,94	871.786.144	100,00	1.323.937.178	100	4.054.069.855	34.167	7.035.953.010
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	95,00 %		97,53 %		85,00 %		14,90		25,50		22,58		34,95		97,93			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100,00%	171.500.000	19,18	18.115.000	100,00%	15.029.000	32,14%	4.743.000	25,00%	0	3,57%	3.600.000	39,29%	6.683.300	100,00%	15.026.300	40,41%	33.141.300
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	27.500.000	1	1.500.000	2	3.283.300	0	0	1	0	0	950.000	1	2.333.300	2	3.283.300	3	4.783.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	19.000.000	1	2.115.000	1	1.500.000	0	0	1	0	0	1.500.000	0	0	1	1.500.000	2	3.615.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	19.000.000	1	3.000.000	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	2	4.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	25.000.000	1	3.000.000	1	1.700.000	1	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1	1.700.000	2	4.700.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	25.000.000	1	3.000.000	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	2	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15	41.000.000	3	4.000.000	3	3.045.700	3	3.043.000	0	0	0	0	0	0	3	3.043.000	6	7.043.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan)	20	15.000.000	4	1.500.000	4	2.000.000	1	0	1	0	1	1.150.000	1	850.000	4	2.000.000	8	3.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100,00%	15.982.973.685	32,67	2.516.779.348	100,00%	2.918.850.283	56,25%	431.820.950	18,75%	1.059.388.634	6,25%	668.802.048	18,75%	744.486.026	100,00%	2.904.497.658	57,67%	5.421.277.006
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	150	15.788.473.685	31	2.489.949.348	30	2.898.850.283	30	427.480.950	0	1.053.204.634	0	664.360.048	0	739.452.026	30	2.884.497.658	61	5.374.447.006
	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60	100.000.000	24	16.000.000	12	12.000.000	3	3.224.000	3	1.747.000	3	4.442.000	3	2.587.000	12	12.000.000	36	28.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	72.500.000	2	7.810.000	2	5.000.000	1	1.116.000	0	3.267.000	0	0	1	617.000	2	5.000.000	4	12.810.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	10	22.000.000	3	3.020.000	2	3.000.000	1	0	1	1.170.000	0	0	0	1.830.000	2	3.000.000	5	6.020.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100,00%	45.000.000	20,00	5.998.000	100,00%	6.000.000	12,50%	1.399.000	37,50%	1.506.000	12,50%	2.732.000	37,50%	363	100,00%	6.000.000	40,00%	11.998.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20	25.000.000	4	2.998.000	4	3.000.000	1	1.399.000	1	0	1	1.601.000	1	0	4	3.000.000	8	5.998.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan)	10	20.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	0	0	1	1.506.000	0	1.131.000	1	363.000	2	3.000.000	4	6.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	100,00%	387.000.000	0,00	0	100,00%	30.000.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	85,71%	23.050.000	85,71%	23.050.000	17,14%	23.050.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35	387.000.000	0	0	7	30.000.000	0	0	0	0	0	0	6	23.050.000	6	23.050.000	6	23.050.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	100,00%	2.802.101.705	27.333.633,22	24.407.934	100,00%	515.386.000	21,25%	73.521.910	23,33%	84.632.780	24,17%	115.218.735	53,33%	231.279.228	122,08%	504.652.653	27.333.652,44%	529.060.587
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket)	2.500	175.000.000	500	19.597.800	12	24.846.000	3	5.700.500	3	4.641.800	3	4.204.500	3	6.815.200	12	21.362.000	512	40.959.800

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	64	175.000.000	14	4.810.000	12	5.920.000	3	1.230.000	3	1.230.000	3	1.230.000	3	2.230.000	12	5.920.000	26	10.730.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	2.332.101.705	########	134	60	430.620.000	21	66.591.410	26	78.760.980	28	109.784.235	38	175.434.028	113	430.570.653	########	430.570.787
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5	120.000.000	0	0	1	54.000.000	0	0	0	0	0	0	1	46.800.000	1	46.800.000	1	46.800.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00%	795.000.000	0,00	0	100,00%	125.899.000	6,25%	20.000.000	0,00%	0	0,00%	0	93,75%	115.547.000	100,00%	135.547.000	17,26%	135.547.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan (Unit)	15	350.000.000	0	0	2	76.000.000	0	0	0	0	0	0	2	66.500.000	2	66.500.000	2	66.500.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	90.000.000	0	0	4	6.500.000	0	0	0	0	0	0	4	5.898.000	4	5.898.000	4	5.898.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit)	35	250.000.000	0	0	2	7.523.000	0	0	0	0	0	0	2	7.523.000	2	7.523.000	2	7.523.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	105.000.000	0	0	4	35.876.000	1	20.000.000	0	0	0	0	3	35.626.000	4	55.626.000	4	55.626.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00%	2.060.684.000	20,00	250.593.093	100,00%	236.766.800	0,00%	22.828.561	0,00%	88.321.961	0,00%	43.163.361	100,00%	79.749.161	100,00%	234.063.044	40,00%	484.656.137
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	215.000.000	1	33.019.293	1	30.230.000	0	9.331.561	0	6.492.561	0	6.492.561	1	6.492.561	1	28.809.244	2	61.828.537
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	1.845.684.000	1	217.573.800	1	206.536.800	0	13.497.000	0	81.829.400	0	36.670.800	1	73.256.600	1	205.253.800	2	422.827.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100,00%	707.000.000	20,00	165.989.780	100,00%	244.183.000	48,65%	31.931.600	12,74%	37.889.500	0,00%	38.270.000	38,61%	123.142.100	100,00%	231.233.200	43,00%	397.222.980
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	85	503.000.000	17	127.738.430	17	152.780.000	8	26.736.500	5	33.184.500	0	35.810.000	4	44.546.500	17	140.277.500	34	268.015.930

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	12.500.000	3	2.479.400	3	2.800.000	0	1.070.100	0	0	0	0	3	1.719.700	3	2.789.800	6	5.269.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit)	60	35.000.000	12	9.490.000	15	10.750.000	8	983.000	3	1.850.000	0	1.882.000	4	5.970.800	15	10.685.800	27	20.175.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	110.000.000	1	19.873.950	1	65.043.000	1	0	0	0	0	0	0	64.743.100	1	64.743.100	2	84.617.050
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit)	70	46.500.000	14	6.408.000	21	12.810.000	9	3.142.000	3	2.855.000	0	578.000	9	6.162.000	21	12.737.000	35	19.145.000
2	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	95 %	26.104.998.145	80 %	1.766.679.379	85 %	2.753.392.000	0	277.732.343	0	169.122.098	100	379.018.631	100	818.120.670	100	1.643.993.742	100	3.410.673.121
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90,00 %	9.661.493.459	100,00 %	614.000.818	85,00 %	1.044.083.000	0	158.809.872	0	78.918.198	100	236.145.135	100	519.798.350	100	993.671.555	100	1.607.672.373
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	100,00%	6.066.493.459	15,48	357.121.517	85,00%	736.588.000	75,00%	152.189.872	0,00%	55.264.998	0,00%	209.296.135	25,00%	287.435.350	100,00%	704.186.355	35,43%	1.061.307.872
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	8	540.000.000	2	4.974.000	2	20.891.000	1	8.752.000	0	664.000	0	2.546.000	1	7.375.000	2	19.337.000	4	24.311.000
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	10	1.670.000.000	2	170.811.588	2	108.259.000	2	19.083.272	0	12.883.000	0	56.194.635	0	19.692.000	2	107.852.907	4	278.664.495
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	8	420.000.000	1	15.275.000	2	42.604.000	1	11.508.000	0	0	0	0	1	24.324.800	2	35.832.800	3	51.107.800
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara MusrenbangKabupaten/Kota (Berita Acara)	7	765.000.000	0	38.115.000	1	36.955.000	1	28.293.300	0	8.600.000	0	0	0	0	1	36.893.300	1	75.008.300
	Penyiapan Bahan Koordinasi MusrenbangKecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi olehKecamatan (Usulan)	2.200	590.000.000	440	14.600.000	440	54.090.000	440	52.918.500	0	0	0	0	0	0	440	52.918.500	880	67.518.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	13	2.081.493.459	2	113.345.929	2	473.789.000	1	31.634.800	0	33.117.998	0	150.555.500	1	236.043.550	2	451.351.848	4	564.697.777
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100,00%	1.895.000.000	22,68	47.376.487	100,00%	51.287.000	66,67%	6.620.000	0,00%	5.935.000	0,00%	13.839.000	33,33%	13.400.000	100,00%	39.794.000	42,68%	87.170.487
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PerencanaanPembangunan Daerah) (Masukan)	340	585.000.000	71	20.424.800	68	11.450.000	68	0	0	0	0	7.989.000	0	900.000	68	8.889.000	139	29.313.800
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	140	680.000.000	38	13.401.687	28	18.791.000	28	6.620.000	0	5.935.000	0	4.804.000	0	0	28	17.359.000	66	30.760.687
	Penyusunan Profil Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yangDiterbitkan (Buku)	5	630.000.000	1	13.550.000	1	21.046.000	0	0	0	0	0	1.046.000	1	12.500.000	1	13.546.000	2	27.096.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100,00%	1.700.000.000	20,00	209.502.814	100,00%	256.208.000	12,50%	0	37,50%	17.718.200	12,50%	13.010.000	37,50%	218.963.000	100,00%	249.691.200	40,00%	459.194.014
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	10	775.000.000	2	34.226.814	2	21.530.000	0	0	1	9.726.200	0	5.018.000	1	6.437.000	2	21.181.200	4	55.408.014
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	20	925.000.000	4	175.276.000	4	234.678.000	1	0	1	7.992.000	1	7.992.000	1	212.526.000	4	228.510.000	8	403.786.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	95,00 %	16.443.504.686	100,00 %	1.152.678.561	85,00 %	1.709.309.000	0	118.922.471	0	90.203.900	100	142.873.496	100	298.322.320	100	650.322.187	100	1.803.000.748
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	2.599.572.863	30,00	228.083.200	85,00%	263.244.000	25,00%	54.204.871	25,00%	52.292.700	0,00%	54.609.696	50,00%	98.646.400	100,00%	259.753.667	60,00%	487.836.867

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMDdan RKPD) (Dokumen)	55	390.000.000	11	9.648.000	11	14.358.000	11	1.942.000	0	8.330.000	0	3.926.000	0	0	11	14.198.000	22	23.846.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)	55	68.000.000	11	6.525.000	11	4.675.000	0	0	11	3.200.000	0	1.475.000	0	0	11	4.675.000	22	11.200.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan (Laporan)	5	382.172.863	1	8.220.000	1	17.782.000	0	0	0	0	0	14.721.000	1	2.531.000	1	17.252.000	2	25.472.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan (Laporan)	5	350.000.000	1	44.463.800	1	74.612.000	0	18.874.900	0	15.604.600	0	647.996	1	39.118.400	1	74.245.896	2	118.709.696
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	25	560.000.000	5	10.816.000	5	29.216.000	5	4.111.000	0	9.706.100	0	6.124.700	0	8.420.000	5	28.361.800	10	39.177.800
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	25	60.000.000	5	17.775.000	5	10.000.000	0	0	5	1.605.000	0	7.375.000	0	1.020.000	5	10.000.000	10	27.775.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	5	425.000.000	5	58.540.000	5	56.890.000	0	0	0	0	0	19.700.000	5	36.337.000	5	56.037.000	10	114.577.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5	364.400.000	1	72.095.400	1	55.711.000	0	29.276.971	0	13.847.000	0	640.000	1	11.220.000	1	54.983.971	2	127.079.371

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	DaerahBidang Pembangunan Manusia																			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00%	1.918.561.411	29,17	115.633.547	85,00%	163.065.000	25,00%	28.805.800	25,00%	11.264.200	0,00%	32.072.000	50,00%	90.923.000	100,00%	163.065.000	62,22%	278.698.547
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	18	293.845.076	3	16.076.000	4	21.876.000	4	9.267.600	0	1.088.000	0	0	0	11.520.400	4	21.876.000	7	37.952.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	18	90.485.603	3	4.719.000	4	4.410.000	0	0	4	1.460.000	0	0	0	2.950.000	4	4.410.000	7	9.129.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPerekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	5	325.000.000	3	13.588.000	4	20.860.000	0	0	0	1.865.000	0	12.315.000	4	6.680.000	4	20.860.000	7	34.448.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5	300.000.000	1	31.198.347	1	24.728.000	0	0	0	0	0	0	1	24.728.000	1	24.728.000	2	55.926.347
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15	220.000.000	3	9.592.000	3	29.887.000	3	8.081.000	0	4.631.200	0	4.044.800	0	13.130.000	3	29.887.000	6	39.479.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	15	68.000.000	3	4.540.000	3	7.950.000	0	0	3	2.050.000	0	4.130.000	0	1.770.000	3	7.950.000	6	12.490.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	5	336.000.000	3	10.962.000	3	16.795.000	0	0	0	170.000	0	6.370.000	3	10.255.000	3	16.795.000	6	27.757.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)																		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5	285.230.732	1	24.958.200	1	36.559.000	0	11.457.200	0	0	0	5.212.200	1	19.889.600	1	36.559.000	2	61.517.200
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00%	2.263.876.953	53,33	194.960.996	85,00%	238.917.000	25,00%	35.911.800	25,00%	26.647.000	0,00%	56.191.800	50,00%	108.752.920	100,00%	227.503.520	106,67%	422.464.516
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	15	332.628.925	4	8.602.000	4	35.418.000	4	19.566.000	0	4.624.000	0	0	0	0	4	24.190.000	8	32.792.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	20	50.000.000	4	4.705.000	4	5.590.000	0	0	4	2.640.000	0	0	0	2.950.000	4	5.590.000	8	10.295.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	5	350.000.000	4	100.754.000	4	62.364.000	0	0	0	0	0	20.796.000	4	41.568.000	4	62.364.000	8	163.118.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Infrastruktur (Laporan)	5	425.000.000	1	56.563.796	1	53.280.000	0	0	0	4.246.000	0	7.851.600	1	41.106.920	1	53.204.520	2	109.768.316
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	55	224.586.928	11	10.886.400	11	35.189.000	11	16.345.800	0	4.077.000	0	0	0	14.766.200	11	35.189.000	22	46.075.400
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi	55	51.661.100	11	3.525.000	11	6.180.000	0	0	11	6.070.000	0	0	0	0	11	6.070.000	22	9.595.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)																		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	5	420.000.000	11	1.803.000	11	14.618.000	0	0	0	1.600.000	0	12.743.000	11	275.000	11	14.618.000	22	16.421.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5	410.000.000	1	8.121.800	1	26.278.000	0	0	0	3.390.000	0	14.801.200	1	8.086.800	1	26.278.000	2	34.399.800
3	Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	100 %	3.980.000.000	100 %	468.703.805	100 %	521.195.000	100	17.491.404	0	39.545.302	0	63.704.000	0	399.867.850	100	520.608.556	100	989.312.361
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	100,00 %	3.980.000.000	100,00 %	468.703.805	100,00 %	521.195.000	100	17.491.404	0	39.545.302	0	63.704.000	0	399.867.850	100	520.608.556	100	989.312.361
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan	100,00%	2.200.000.000	20,00	300.586.279	100,00%	321.172.000	0,00%	7.687.000	0,00%	29.294.200	0,00%	36.374.000	100,00%	247.566.850	100,00%	320.922.050	40,00%	621.508.329
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan OtonomiDaerah (Laporan)	5	1.050.000.000	1	65.253.479	1	85.212.000	0	7.687.000	0	22.858.600	0	32.273.000	1	22.267.850	1	85.086.450	2	150.339.929
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5	1.150.000.000	1	235.332.800	1	235.960.000	0	0	0	6.435.600	0	4.101.000	1	225.299.000	1	235.835.600	2	471.168.400

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	
			I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=5+11	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan	100,00%	1.250.000.000	16,67	131.101.000	100,00%	149.899.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.376.000	0,00%	127.423.000	100,00%	149.799.000	33,33%	280.900.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	6	1.250.000.000	1	131.101.000	1	149.899.000	1	0	0	0	0	22.376.000	0	127.423.000	1	149.799.000	2	280.900.000
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	50,00%	530.000.000	20,00	37.016.526	50,00%	50.124.000	0,00%	9.804.404	0,00%	10.251.102	0,00%	4.954.000	100,00%	24.878.000	100,00%	49.887.506	40,00%	86.904.032
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	10	530.000.000	2	37.016.526	2	50.124.000	0	9.804.404	0	10.251.102	0	4.954.000	2	24.878.000	2	49.887.506	4	86.904.032

BAB 4
PENUTUP

Laporan Kinerja ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik, pemangku kepentingan, dan pemerintah sendiri mengenai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan unsur rencana program kerja, pencapaian tujuan kinerja, keuangan, pengelolaan sumber daya, transparansi, serta rekomendasi dan tindak lanjut atas pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 dengan Bupati Kepulauan Selayar.

Adapun keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat terus di tingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappelitbangda tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya 3 (tiga) indikator sasaran yang baru dapat diukur dengan realisasi kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 adalah sebesar 117,77%;
2. Realisasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebesar Rp.6.322.618.083,00 atau sebesar 98.09%;
3. Berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan data keuangan Bappelitbangda tahun 2023, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar 79,25% atau sangat efisien;
4. Secara umum pencapaian target tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam implementasi program, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait serta ketersediaan data pembangunan yang komprehensif dan kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan;
5. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :
    - Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai salah satu

kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappelitbangda Kepulauan Selayar;

- Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan kelitbangan dari stakeholder terkait;
- Melakukan desiminasi tentang data pembangunan daerah dan kelitbangan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Meningkatkan penerapan hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi lainnya sesuai kewenangannya.
- Melakukan inovasi secara terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja Pembangunan daerah.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tahun selanjutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih maju dan lebih baik.